



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Majapahit Nomor 4 Podosugih, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 412522 Faksimile (0285) 412522
Pos-el: <https://bkpsdm.pekalongankota.go.id/> Laman: <https://bkpsdm.pekalongankota.go.id/>

Panduan Cara Menyampaikan Pengaduan melalui Hotline "Lapor Pak" BKPSDM

1



akses pengaduan
melalui Nomor WA :
08553338333

2



Isikan Identitas (Nama,
Alamat, No HP)

3



uraikan isi pengaduan
dengan jelas dan
lengkap

4



Kirimkan
Pengaduanmu dan
tunggu respon terkait
pengaduan

5



Lampirkan bukti
dukung jika
tersedia

6



gunakan Bahasa
Indonesia yang baik
dan benar

7



Hotline
memberikan
respon pesan cepat

LAPORI | TENTANG LAPORI | STATISTIK | FAQ | MASUK | DAFTAR

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Sampaikan Laporan Anda

Pilih klasifikasi Laporan

☒ PENGADUAN ☐ ASPIRASI ☐ PERNYATAAN INFORMASI

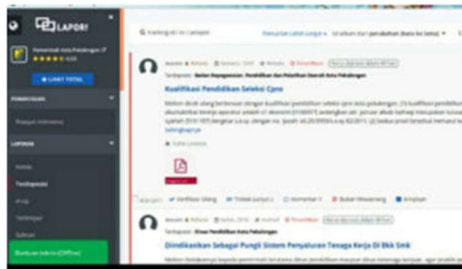
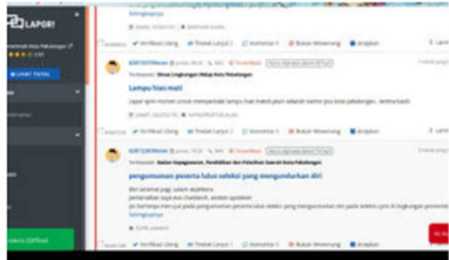
Pilih instansi yang akan menerima laporan Anda

Waktu pengaduan (jam dan menit)

Waktu laporan (jam dan menit)

Waktu pengiriman (jam dan menit)

Waktu laporan (jam dan menit)



Mengetahui,

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kota Pekalongan



RUSMAN BUDI HARJO, A.KS., M.M

NIP. 19720913 199803 1 001



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Majapahit Nomor 4 Podosugih, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 412522 Faksimile (0285) 412522
Pos-el: bkpsdm@pekalongankota.go.id/ Laman: <https://bkpsdm.pekalongankota.go.id/>

Hasil Penanganan Pengaduan Tahun 2026

No	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian
1	Whatsapp hotline (Lapor Pak)	Mau konfirmasi kak, ontime saya kok belum bisa login ya kak, padahal dari kantor saya SATPOL P3KP sudah bersurat kak?	06-Feb-26	Siang kak, informasi surat tsb sudah disposisi ke admin, kami konfirmasi dl ya kak	1 Hari
2	Whatsapp hotline (Lapor Pak)	Ijin Bertanya Maaf kak boleh tidak kalau perjanjian kerja di sama dg yg lain biar ada gelarnya	11-Feb-26	Sementara menunggu informasi dari kami ya kak	1 Hari
3	Whatsapp hotline (Lapor Pak)	Mohon maaf sebelumnya karena kami ASN dari luar provinsi bisakah untuk mengikuti pelatihan pelatihan yang diadakan dan mohon link untuk masuk	14-Feb-26	Baik terimakasih kak atas atensinya, mohon maaf untuk saat ini ASN di luar Kota Pekalongan belum dapat mengikuti pelatihan LMS Pinterberbagi, kami upayakan dalam waktu dekat seluruh ASN dapat membuat akun dan bisa mengakses pelatihan di Pinterberbagi	1 Hari
4	Whatsapp hotline (Lapor Pak)	Mohon Maaf Ijin Bertanya Cara login aplikasi pintar berbagi Gimana Ya kak	16-Feb-26	Untuk saat ini aplikasi tersebut hanya untuk ASN Kota Pekalongan yang dapat mengikuti pelatihan LMS Pinterberbagi, kami upayakan dalam waktu dekat seluruh ASN dapat membuat akun dan bisa mengakses pelatihan di Pinterberbagi	1 Hari
5	Whatsapp hotline (Lapor Pak)	Saya ingin bertanya tentang cara masuk untuk daftar ke pelatihan anti korupsi	17-Feb-26	Silahkan utk langsung dengan menggunakan NIP	1 Hari
6	Whatsapp hotline (Lapor Pak)	ijin Bertanya kak Apakah ada Form Pengajuan Mutasi Tidak yaa	23-Feb-26	Kami ada Peraturan Walikota No 42 Tahun 2020, untuk lebih lanjut bisa menghubungi PIC kami Bp. Hardiyanto	1 Hari

7	Lapor Ajib	selamat siang, kami selaku tenaga kontrak sk walikota mau menanyakan kapan kami bisa mencairkan JHT kami , karena status kami sudah berganti menjadi P3k bukan lagi tenaga kontrak sk walikota , terimakasih sebelum nya , lapor ajib	08-Jan-26	Terima kasih atas masukan yang disampaikan melalui Lapor Ajib. Sebelumnya kami ucapkan selamat telah menjadi PPPK Paruh Waktu semoga dapat menambah semangat untuk mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Berkenaan dengan pencairan dana JHT tenaga kontrak Walikota, kami masih berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih	1 hari
8	Lapor Ajib	Selamat Siang BKPSDM , saya mau buat pengaduan saya tenaga kontrak sk walikota , dengan no Bpjs jamsostek 05L40006203 atas nama slamet riyadi, tadi saya ingin klaim Jht saya , sudah saya cek di aplikasi JMO status sudah TIDAK AKTIF tapi ketika mengisi di link lapak asik bpjs status saya masih AKTIF , KARENA PERIHAL TERSEBUT JADI TIDAK BISA MELANJUTKAN PENGISIAN PENCAIRAN JHT SAYA. saya disuruh oleh karyawan bpjs untuk menanyakan perihal tersebut ke bagian HRD , , terimakasih jawaban nya ini foto dari aplikasi jmo dan lapak asik bpjs saya sertakan, terimakasih sebelum nya	14-Jan-26	Terima kasih sudah menghubungi BKPSDM, silahkan untuk bisa melakukan klaim otomatis melalui link bpjs ketenagakerjaan dengan melampirkan bukti surat pemberhentian status tenaga kontrak yang sudah dikirimkan ke OPD masing-masing (koordinasi dengan Kasubag. Umum dan Kepegawaian) Berikut link yang bisa diakses lapasik.bpjsketenagakerjaan.go.id	1 hari
9	Lapor Ajib	Assalamu'alaikum..Sebelumnya a saya Mohon maaf kepada bapak Walikota & ibu Wakil Walikota Pekalongan krna Sdh mengganggu waktunya 🙏 Perkenalkan Saya istri dari a.n. Nurjoyo (ASN dinas kesehatan kota Pekalongan).Saya ingin menyampaikan & meminta bantuan kepada Bpk Walikota & ibu Wakil WPalikota perihal Suami saya Sdh melakukan perbuatan tercela / Penelantaran terhadap anak. Bahwa semula suami Tdk memberi nafkah utk anak selama kurang lebihnya 1 tahun. Saya sdh melaporkan suami ke Lembaga Perlindungan Anak /LPPAR . Saya & suami Sdh membuat	02-Feb-26	Wa'alaikumsalam wr.wrb. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas laporan yang ibu sampaikan atas suami ibu yang berkedudukan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Unit kerja: Dinas Kesehatan). Atas perihal tersebut,kami BKPSDM selaku perangkat daerah yang membidangi kepegawaian telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Untuk selanjutnya kami sarankan agar ibu berkoordinasi langsung menyampaikan aduan ibu tersebut melalui kepegawaian pada Dinas Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti dan diberikan jalan keluar terbaik.	1 hari

		surat kesepakatan nafkah bermaterai utk anak & di saksikan oleh saksi2 dari tim LPPAR di Lembaga Perlindungan Perempuan Anak (LPPAR) yg salah 1 isi kesepakatannya adalah " pihak kedua (saya) atas kesepakatan pihak pertama(suami) mengambil 50% gaji & pendapatan lainnya di tempat pihak pertama bekerja setiap bulannya". Setelah adanya surat kesepakatan, pemberian Nafkah diberikan Lngsung oleh bendahara gaji dngn cara transfer ke rekening saya & pemberian nafkah berjalan dngn baik & lancar. Akan tetapi setelah bendahara Ybs Sdh pensiun ,pemberian Nafkah yg mentransfer ke rekening saya adalah suami sya sendiri. Semenjak pemberian Nafkah yg mentransfer suami, menjadi Tdk tepat, gaji yg hrsnya di TF di tgl 1 - 5 ,suami TF gaji di tgl 27 - 31, uang TPP agustus keluar di Bln Agustus tetapi suami TFnya di Bln September bahkan di bln November 2025 & Desember 2025, suami sama sekali Tdk memberikan uang nafkah kpda anak,baik itu gaji maupun TPP yg Sdh di sepakati, sama sekali Tdk di berikan . Saya Sdh melaporkan hal ini ke kantor suami (dinas kesehatan kota PKL) di tgl 17 Desember 2025 dan Pda tgl 31 Desember, suami di panggil atasan & di berikan pembinaan . Di hadapan atasan, suami mengatakan & berjanji " siap memberikan nafkah sesuai kesepakatan secepatnya " akan tetapi suami Tdk menepati janjinya. Di tgl 28 Januari 2026 suami hanya mentransfer 500 ribu & pemberian tsb sangat tdk pantas dan tdk sesuai kesepakatan, mengingat uang nafkah utk anak yg blom di berikan adalah 50% dari uang			
--	--	--	--	--	--

		Tpp September,TPP Oktober,TPP November ,TPP Desember ,TPP Januari , gaji November ,gaji Desember , gaji Januari dan yg paling utama adalah di Bln November & Desember suami sama sekali Tdk memberikan nafkah utk anak Sepeserpun. Berdasarkan hal2 tsb,dngn segala kerendahan hati, saya mohon kpda Bpk Walikota dan ibu Wakil Walikota PKL berkenan utk membantu saya agar a.n. Nurjoyo sbgai ASN & teladan bagi masyarakat bnr2 mampu menyadari kesalahannya dan memberikan uang nafkah utk anak yg Sdh menjadi kesepakatan bersama & Sdh menjadi bagian utk anak krna mengingat anak tmbah besar semakin bnyak pengeluarannya ,utk kebutuhan pokok sehari-hari , biaya pendidikan , biaya kesehatan ,dll .Demikian hal2 yg dpt saya sampaikan, Atas perhatian & kebijaksanaannya saya haturkan bnyk terima ksh 🙏			
--	--	---	--	--	--

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pekalongan, 10 Maret 2026
Kepala BKPSDM Kota Pekalongan



Rusmani Budiharjo, A.KS, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 197209131998031001